

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Provinsi Jawa Tengah

Halaman 8

Bantuan Keuangan Baru Terserap 1,35%

Pemprov Alokasikan Rp 2 Triliun

SEMARANG - Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan (bankeu) untuk 35 kabupaten/kota tahun 2017 sebesar Rp 2 triliun.

Namun, hingga semester pertama 2017, serapan anggaran baru Rp 27 miliar (1,35%).

Jumlah itu hampir setengah dana Pemprov yang masih mengendap di rekening kas daerah. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melansir, dana simpanan pemerintah daerah Jateng akhir Juni 2017 mencapai Rp 4,81 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng Sumarno mengatakan, anggaran tak bisa ditransfer ke kabupaten/kota jika tidak ada permohonan pencairan.

Hal itu sesuai dengan Perpres

54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dana bankeu itu dialokasikan untuk pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik.

"Progres fisik dan pengawasan kegiatan di kabupaten/kota seperti apa, bukan wewenang kami. Soal pencairan anggaran, masih sangat kecil," kata Sumarno, Senin (14/8).

Menurutnya, tak semua bankeu 2016 terserap. Sebagian masuk kembali ke APBD provinsi menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Ada kabupaten yang tak bisa menjalankan pembangunan fisik akibat gagal lelang.

Pada semester pertama 2017, total serapan anggaran di APBD Jateng Rp 34,09% dari alokasi Rp 23,36 triliun. Alokasi itu untuk pos belanja langsung maupun tak langsung.

Anggaran selain bankeu meru-

upakan alokasi untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD). Hingga akhir Juni 2017, serapan tertinggi di Dinas Koperasi dan UKM 46,9% dan terendah di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 12,8%.

Salah satu penyebab serapan rendah di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah gagal lelang renovasi Stadion Jatidiri Semarang senilai Rp 137 miliar. Kini telah dilakukan lelang ulang.

Sumarno menjelaskan, posisi serapan anggaran tahun ini hampir sama dengan tahun lalu. Serapan pada semester pertama biasanya memang rendah. Namun bukan berarti pembangunan fisik tidak jalan.

"Biasanya para kontraktor baru mengklaim anggaran pada akhir tahun, tidak pada tiap termin," ujarnya.

Bukan Kesengajaan

Di satu sisi, banyaknya dana yang masih berada di rekening kas daerah akan memperlihatkan performa kinerja kurang bagus. Namun di sisi lain, lanjut Sumarno, hal itu memberikan keuntungan.

Maksudnya, ada keuntungan bunga untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam

APBD 2017. Pada tahun ini, Pemprov ditarget memperoleh pendapatan dari bunga deposito sebesar Rp 106 miliar dan jasa giro Rp 50 miliar.

Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan, dana mengendap di bank bukan merupakan kesengajaan. Ia meminta kabupaten/kota segera mencairkan bankeu.

Kontraktor dan dinas juga diimbau segera mencairkan jatah anggaran.

"Uang itu (mengendap) bukan karena takut menjalankan (program) atau untuk mencari bunga. Meski dalam ketentuan target bunga juga ada, tapi sebenarnya ndak usahlah," kata Ganjar.

Gubernur menambahkan, saldo di rekening itu disebabkan pemasukan dari sektor pajak cukup tinggi, namun serapan anggaran masih minim. Faktor utama adalah banyak kontraktor yang memilih menunda klaim pembayaran.

Biasanya mereka akan mengklaim pada akhir tahun. Faktor lain adalah gagal lelang atau sebagian dana pilkada yang belum dicairkan.

"Kami sebenarnya ingin uang itu cepat keluar. Lelang fisik saja sudah dimulai bulan Desember," tutur Ganjar. (H81-18)